

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH JEPANG
TERHADAP KONDISI DEMOGRAFIS AKIBAT
TREN *CHILDFREE***

Skripsi

Oleh

**BRAJA PRATAMA PUTRA
NPM 2156071013**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH JEPANG TERHADAP KONDISI DEMOGRAFIS AKIBAT TREN *CHILDFREE*

Oleh

BRAJA PRATAMA PUTRA

Dari tahun 1990-an sampai dengan tahun 2025, Jepang mengalami penurunan dalam bidang demografinya. Hal ini dikarenakan adanya sebuah tren yang bernama *childfree*, yang dimana dalam tren *childfree* ini banyak individu muda memutuskan untuk tidak memiliki anak. Sehingga hal ini membuat masalah di negara Jepang itu sendiri, akibat masalah ini pemerintahan Jepang membuat kebijakan untuk mengatasi masalah ini dengan tujuan membuat individu muda mau menikah maupun mempunyai anak untuk menstabilkan populasi negara.

Fokus utama penelitian ini adalah mengdeskripsikan kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah Jepang, dengan menggunakan teori *policy cycle* untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan demografi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai kebijakan, di antaranya adalah *angel plan*, *childcare and familycare leave law*, *new angel plan*, *plus one policy*, *abenomics*, dan *child and family agency*.

Hasil penelitian ini adalah menganalisis kebijakan yang dibuat pemerintah Jepang menggunakan teori *policy cycle* yaitu, *agenda setting*, *policy formulation*, *decisions making*, *implementation*, *evaluation*. Lalu dengan hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, tren *childfree* masih terus berkembang, sehingga memberikan tantangan besar bagi stabilitas sosial dan ekonomi Jepang di masa depan. Penelitian ini memberikan analisis tentang bagaimana cara pemerintah Jepang membuat kebijakan untuk mengatasi masalah tren *childfree*.

Kata kunci: kebijakan pemerintah Jepang, tren *childfree*, penurunan angka kelahiran.

ABSTRACT

ANALYSIS OF GOVERNMENT OF JAPAN POLICY ON DEMOGRAPHIC CONDITIONS DUE TO THE CHILDFREE TREND

By

BRAJA PRATAMA PUTRA

From the 1990s to 2025, Japan has experienced a decline in its demographics. This is due to a trend called childfree, where in this childfree trend many young individuals decide not to have children. So this creates a problem in Japan itself, as a result of this problem the Japanese government makes policies to overcome this problem with the aim of making young individuals want to get married or have children to stabilize the country's population.

The main focus of this study is to describe the public policies implemented by the Japanese government, using the policy cycle theory to analyze the policy-making process related to demographics. Through a qualitative approach, this study analyzes various policies, including the angel plan, childcare and familycare leave law, new angel plan, plus one policy, abenomics, and child and family agency.

The results of this study are analyzing the policies made by the Japanese government using the policy cycle theory, namely, agenda setting, policy formulation, decisions making, implementation, evaluation. Then with the results of the analysis, it shows that although various policies have been implemented, the childfree trend continues to grow, thus posing a major challenge to Japan's social and economic stability in the future. This study provides an analysis of how the Japanese government creates policies to address the childfree trend.

Keywords: Japanese government policies, childfree trend, declining birth rates

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH JEPANG TERHADAP
DEMOGRAFIS AKIBAT TREN *CHILDFREE***

Oleh

Braja Pratama Putra

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
“SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL”

Pada

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH
JEPANG TERHADAP KONDISI
DEMOGRAFIS AKIBAT TREN *CHILDFREE***

Nama Mahasiswa : **Braja Pratama Putra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2156071013**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003

Moh. Nizar, S.IP., M.A.
NIP 19830819 201504 1 005

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.**

Sekretaris

: **Moh. Nizar, S.IP., M.A.**

Penguji Utama

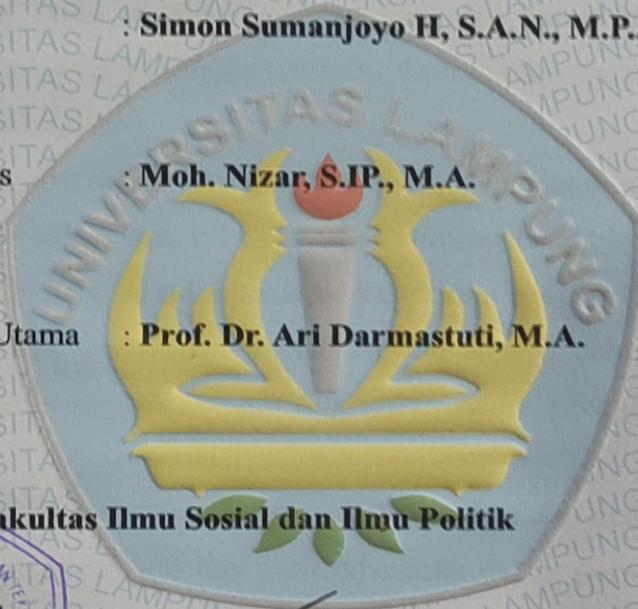
: **Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 Juni 2025**



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Braja Pratama Putra

NPM. 2156071013

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Braja Pratama Putra, lahir di Canggau pada tanggal 23 Juni 2003 yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Habib Hasan dan Ibu Asminar. Penulis memulai Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Islam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2008-2009, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2009-2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2015-2018 dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2018-2021. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kepanitiaan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJHI), berupa kegiatan funcamp pada tahun 2022. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan Magang Mandiri di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dengan posisi Divisi Persidangan. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gelombang Panjang Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024. Penulis juga berkesempatan menjadi Koodinator Kecamatan saat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Kasui.

KEPADA AYAH DAN MAK YANG TERSAYANG

MOTTO

Keyakinan adalah sesuatu yang lebih baik dari apapun
(Shinnen wa nan yori mo sugurete iru mono desu) – Uzumaki Nagato

Spread love and kindness

Mencoba menjadi lebih baik dari kemarin

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Kondisi Demografis Akibat Tren *Childfree*”. Sholawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala berkah dan rahmat-Nya dalam memberikan kemudahan baik selama penyusunan hingga menyelesaikan skripsi, serta kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menuntun dari zaman kegelapan menuju jalan kemenangan
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
3. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa membimbing, memberikan masukan baik pratikal maupun intelektual kepada penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi

5. Mas Moh. Nizar, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang selalu memberikan masukan dengan sabar kepada penulis skripsi;
6. Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan wawasan baru, saran, dan motivasi agar skripsi penulis dapat lebih baik lagi serta agar penulis menjadi insan yang bermanfaat di masa depan;
7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, tenaga, dan bantuan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga penulisan skripsi;
8. Kedua Orang Tua penulis, Ayah Habib Hasan dan Ibu Asminar sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini, kepada Ayah dan Mak terima kasih juga sudah selalu mendukung penulis dalam segala bentuk dari penulis kecil sampai sekarang yang tidak dapat disebutkan;
9. Almh. Ngah Ayu Amelia dan Alm. Adik Rio Alfarizi, terima kasih sudah memberikan penulis makna untuk melanjutkan kehidupan;
10. Adik Ekbal Eldar, terima kasih sudah hadir memberi suasana baru di keluarga;
11. Keluarga besar dari keluarga Hasan dan keluarga Serimani, yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moril selama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studinya;
12. Halilah Roja Nasywa, yang selalu ada di samping penulis dari masa awal SMA hingga masa akhir perkuliahan, ucapan terima kasih yang sangat dalam karena atas segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun bisa menyemangati dan menghangati hati penulis, dari duka maupun suka yang telah kita lalui bersama, dan penulis berharap kita disatukan menjadi sebuah keluarga;
13. Arjun Rifki, Andreas Albenny, Bayu Aldrian, Dillon Andrea, Dimas Yudha Galuh Dimas, M. Feri, M. Ardi, Nanda Saputra, Rangga Amarta, Wahyu Fernando dan teman-teman “Exotic” yang tidak dapat disebutkan satu per

satu terima kasih sudah menemani sejak masa SMP, dan sudah penulis anggap seperti keluarga kedua;

14. Dimas Kuncoro, Erwin Tri, M. Nur Vito, Paisal Zul Pandri, Rizki Hidayat dan teman-teman “AKTS” yang tidak dapat disebutkan satu per satu terima kasih sudah menemani sejak masa SMA;
15. Ghulam Dzaky Aditya, Michael Rizky, Athariq Putra Pulungan, Belva Mahardika, dan teman-teman “Rahasia Islami” yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih karena sudah menemani dalam masa perkuliahan ini;
16. Riyanda, yang sudah menemani penulis selama masa perkuliahan di Kost Delima selama 3 tahun;
17. Teman-teman Hubungan Internasional Angkatan 21 yang menemani perkuliahan di Universitas Lampung;
18. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang. Penulis juga berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, serta berguna bagi seluruh civitas akademika dan para pembaca.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025
Penulis,

Braja Pratama Putra
NPM. 2156071013

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Penelitian Terdahulu	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Kerangka Teori	16
2.2.1. Konsep Kebijakan Publik.....	16
2.2.2. Teori Policy Cycle.....	18
2.2. Kerangka Pemikiran	20
III. METODE PENELITIAN	23
3.1. Tipe Penelitian	23
3.2. Fokus Penelitian	24
3.3. Sumber Data	25
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5. Teknik Analisis Data.....	26
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1. Gambaran Umum	27
4.2. Kebijakan Pemerintah Jepang	30
4.3. Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang menggunakan Teori Policy Cycle.....	31

4.3.1 Agenda Setting.....	32
4.3.2 Policy Formulation.....	40
4.3.3 Decision Making.....	45
4.3.4 Implementation	49
4.3.5 Evaluation	59
4.4 Analisis terhadap Kebijakan Pemerintah Jepang yang Telah Dibuat ...	63
4.4.1 Analisis Perbedaan Kebijakan Pemerintah Jepang	65
V. KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2.Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Komparasi Penelitian	13
Tabel 2. Analisis Kebijakan menggunakan Agenda Setting	34
Tabel 3. Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang menggunakan Policy Formulation	42
Tabel 4. Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang menggunakan Decision Making	47
Tabel 5. Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang menggunakan Implementation	51
Tabel 6. Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang menggunakan Evaluation	61
Tabel 7. Perbandingan Kebijakan Angel Plan dan Childcare and Familycare Law	67
Tabel 8. Perbandingan Kebijakan New Angel Plan dan Plus One Policy	70
Tabel 9. Perbandingan Kebijakan Abenomics dan Children and Family Agency	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Proyeksi Tren Pertumbuhan Populasi Jepang (2015-2065).....	6
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian	22
Gambar 3. Perbandingan Tingkat Pekerjaan dan Pekerjaan Reguler antara Pria dan Wanita berdasarkan Kelompok Usia.....	28
Gambar 4. Total Populasi Tahun 1994-2025	60

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
BOJ	: Bank Of Japan
CFA	: Children and Family Agency
HI	: Hubungan Internasional
IVF	: In Vitro Fertilization
JGB	: Japanese Government Bond
NIPPSSR	: National Institute of Population and Social Security Research
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
TFR	: Total Fertility Rate

I. PENDAHULUAN

Skripsi ini menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang terkait tren *childfree* dan dampaknya terhadap kondisi demografis negara. Penelitian ini dianggap penting dan layak dilakukan berdasarkan justifikasi teoretis dan empiris yang kuat, serta relevansi metodologis yang mendalam. Dalam bab ini, peneliti menyajikan latar belakang mengenai fenomena *childfree* di Jepang, faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial yang signifikan ini, serta efek globalisasi yang mulai menyebar. Selain itu, dalam bab ini juga disajikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian ini, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut tentang kebijakan pemerintah Jepang dalam menghadapi masalah demografis yang semakin kompleks.

1.1. Latar Belakang

Jepang merupakan negara yang berada di Kawasan Asia tepatnya di Asia Timur. Terletak di Samudera Pasifik di lepas pantai timur laut daratan Asia, Jepang merupakan negara kepulauan yang membentang dari timur laut hingga barat daya dengan luas sekitar 3.000 kilometer (1.900 mil) dari Laut Okhotsk di Utara hingga Laut Cina Timur di Selatan (Mulki, 2015). Jepang, sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, menghadapi tantangan demografis yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah penurunan angka kelahiran

yang terus berlanjut, yang berkontribusi pada penuaan populasi. Jepang merupakan negara yang penuh inovasi dan teknologi begitu juga dengan pola pikir tiap individu yang unik.

Contoh pola pikir unik yang ada di Jepang adalah tentang *childfree*, *childfree* sendiri memiliki arti sebuah keputusan untuk tidak memiliki anak. Karena hal ini lah Jepang menjadi negara Asia pertama yang mengalami penurunan angka kelahiran yang nyata (Ma, 2009). Fenomena *childfree* ditandai dengan angka kelahiran yang tiap tahunnya mengalami penurunan, pada awalnya angka kelahiran turun pada tahun 1950-an disebabkan oleh turunnya tingkat kesuburan masyarakat Jepang kala itu tetapi dalam masa ini angka kelahiran masi bisa dianggap stabil namun pada tahun 1970-an angka kelahiran mengalami penurunan yang drastis (K, 2017). Fenomena *childfree* di Jepang, yaitu pilihan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, semakin menonjol di kalangan masyarakat Jepang, terutama pada generasi muda dan pasangan yang tinggal di wilayah perkotaan.

Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingginya biaya hidup, tekanan ekonomi, jam kerja yang panjang, serta perubahan nilai-nilai sosial yang mengarah pada individualisme dan prioritas karier. Selain itu, berkembangnya gerakan feminisme dan kesadaran akan hak perempuan atas tubuh dan masa depan turut memperkuat pilihan untuk tidak memiliki anak. Akibatnya, angka kelahiran di Jepang mengalami penurunan yang signifikan dan menimbulkan masalah demografi, seperti penuaan populasi serta kekurangan tenaga kerja produktif. (Wang, 2023). Tren ini telah memicu diskusi tentang kebijakan pemerintah terkait dukungan bagi keluarga dan bagaimana Jepang dapat menghadapi tantangan demografis yang semakin kompleks.

Tren *childfree* di Jepang tidak hanya menjadi isu domestik, melainkan juga memiliki dimensi internasional, terutama dalam konteks globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh budaya barat, teknologi, serta nilai-nilai individualistis yang mempercepat perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat Jepang (Sandrina Natasya, 2025), termasuk dalam hal keputusan

reproduksi. Fenomena ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana globalisasi mampu mengubah struktur sosial dan demografi suatu negara.

Dalam ilmu hubungan internasional, tren *childfree* di Jepang juga menimbulkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan sosial negara tersebut, yang pada gilirannya berpengaruh pada posisi Jepang di panggung global. Penurunan populasi dan penuaan masyarakat dapat memengaruhi daya saing ekonomi, hubungan perdagangan internasional, serta kebijakan imigrasi dan tenaga kerja asing (Sandrina Natasya, 2025). Selain itu, isu ini juga berkaitan dengan kebijakan negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa, sehingga menjadi topik diskusi dalam forum-forum internasional terkait isu demografi, *gender*, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, studi mengenai tren *childfree* di Jepang dalam kaitannya dengan ilmu hubungan internasional di era globalisasi menjadi penting untuk memahami dinamika perubahan sosial dan tantangan yang dihadapi negara-negara modern seperti Prancis, Swedia dan Jerman.

Globalisasi mempercepat pertukaran nilai, gaya hidup, dan ide-ide baru melalui media, internet, serta budaya populer. Seiring meningkatnya konektivitas global, tren *childfree* yang awalnya dianggap tabu di banyak negara kini semakin terlihat dan diterima secara luas, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di media sosial dan terpapar budaya populer internasional (Malhotra, 2015). Dalam ilmu hubungan internasional terdapat ilmu *pop culture*, *pop culture* disini berperan sebagai saluran utama penyebaran gagasan ini lewat influencer, konten viral, film, serial, musik, dan platform media sosial yang menonjolkan kebebasan individu, prioritas karier (Malhotra, 2015).

Melalui *pop culture*, narasi *childfree* tidak hanya menjadi wacana pribadi, tetapi juga bagian dari identitas generasi muda yang ingin menolak norma-norma tradisional tentang pernikahan dan reproduksi (Malhotra, 2015). Figur publik, selebriti, dan influencer baik lokal maupun internasional yang terbuka tentang pilihan hidup *childfree* ikut memperkuat keberagaman pilihan hidup dan memberikan legitimasi sosial bagi siapa saja yang memilih

tidak memiliki anak. Hasilnya, stigma terhadap *childfree* perlahan berkurang, dan semakin banyak orang merasa nyaman untuk bersuara tentang preferensi hidup mereka (Malhotra, 2015). Dengan kata lain, globalisasi melalui pop culture membuat tren *childfree* menjadi lebih terlihat dan diterima sebagai salah satu pilihan hidup modern, sekaligus mempercepat perubahan norma sosial di berbagai belahan dunia.

Sejak akhir abad ke-20, negara Jepang mengalami penurunan angka kelahiran yang signifikan, dengan *Total Fertility Rate* (TFR) berada di bawah tingkat penggantian populasi (2,1 anak per wanita) sejak 1974. Pada 2022, TFR Jepang mencapai rekor terendah sebesar 1,26, jauh di bawah rata-rata global (1,7) maupun negara-negara maju seperti Prancis (1,8) atau Swedia (1,7) dan Jerman (1,4) (Central Intelligence Agency, 2024).

Keputusan untuk tidak memiliki anak, atau *childfree* ini, menjadi pilihan bagi wanita atau pasangan karena berbagai alasan. Misalnya, latar belakang keluarga yang patriarki, pertimbangan tentang cara mengasuh anak di masa depan, tingginya biaya hidup, dan masalah lingkungan. Dengan memilih *childfree*, wanita dapat lebih bebas mengejar tujuan hidup mereka, seperti karir dan mengejar impian yang tinggi (Ela et al., 2022). Biaya hidup yang tinggi di kota juga membuat pasangan berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk memiliki anak, terutama di kota metropolitan seperti Tokyo dan Osaka, menjadi penghalang utama. Biaya rata-rata pengasuhan anak hingga usia 15 tahun mencapai ¥15 juta (sekitar Rp1,5 miliar), sementara harga properti di pusat kota meningkat 300% sejak 1990 (Kii et al., 2025). Selain itu, terdapat juga wanita atau pasangan yang merasa tidak mampu mengasuh anak karena khawatir tidak bisa mendidik mereka dengan baik atau memberikan kehidupan yang lebih baik (Nugroho et al., 2022). Tren ini memiliki implikasi yang luas, dengan konsekuensi potensial bagi pertumbuhan populasi, ekonomi, dan sistem jaminan sosial negara Jepang.

Kekurangan generasi muda tentunya menjadi sebuah tantangan bagi negara Jepang. Tren *childfree* membuat perubahan demografi dengan populasinya yang menua dan kurangnya populasi usia remaja maupun

dewasa. Hal ini menyebabkan perekonomian Jepang terus mengalami perubahan yang signifikan dari berbagai aspek (George, 2023). *Childfree* juga telah mempercepat krisis demografi yang menyebabkan menyusutnya tenaga kerja dan meningkatnya tekanan pada sistem jaminan sosial (National Institute of Population and Social Security Research, 2017).

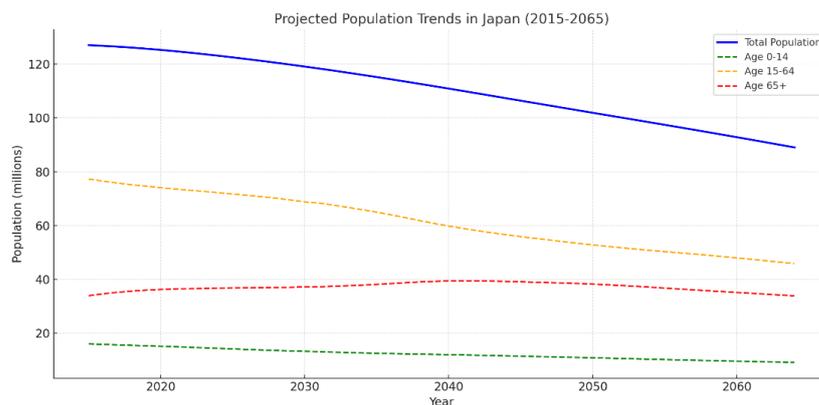
Dampak tren *childfree* terhadap demografi Jepang bersifat sistemik. Populasi usia kerja (15–64 tahun) diproyeksikan turun dari 74 juta (2020) menjadi 45 juta pada 2065, mengancam produktivitas ekonomi. Rasio ketergantungan lansia (jumlah pensiunan per 100 pekerja) akan melonjak dari 50 (2020) menjadi 80 (2065) (International Monetary Fund. Asia and Pacific Dept, 2020), hal ini akan membebani sistem jaminan sosial dan kesehatan. Sektor-sektor vital seperti perawatan lansia, konstruksi, dan layanan publik sudah mengalami defisit tenaga kerja hingga 1,4 juta orang pada 2023. Dengan adanya pergeseran demografi ini tentunya menyebabkan kekurangan tenaga kerja di berbagai industri, berkurangnya akan konsumsi domestik.

Tantangan ekonomi yang di alami Jepang saat ini sangat terikat dengan tren *childfree*, karena pada saat ini Jepang menghadapi populasi usia kerja yang menyusut bersamaan dengan meningkatnya demografi lansia disana yang menyebabkan rasio ketergantungan yang lebih tinggi. Pada tahun 2060, diperkirakan akan ada 79 pensiunan di setiap 100 orang dewasa (National Institute of Population and Social Security Research, 2017). Tren *childfree* ini membuat ketidakseimbangan demografi yang membuat pertumbuhan ekonomi Jepang menjadi lambat karena partisipasi dari angkatan yang bekerja menyusut dan permintaan layanan sosial menjadi meningkat.

Sebuah riset yang dilakukan oleh lembaga *Population Projections for Japan* (Population Projections for Japan, 2017), riset ini memperkirakan jumlah populasi Jepang dari tahun 2016 sampai tahun 2065 yang pada saat ini menghadapi tantangan besar akibat tren demografi yang berubah secara signifikan. Berdasarkan proyeksi dengan asumsi tingkat kesuburan dan tingkat kesadaran, saat ini jumlah penduduk Jepang diperkirakan akan

menurun drastis dari 127 juta pada tahun 2015 menjadi sekitar 88 juta pada tahun 2065. Penurunan ini diiringi dengan perubahan struktur usia penduduk. Populasi anak-anak (0–14 tahun) terus menurun dari 15,95 juta pada tahun 2015 menjadi 8,98 juta pada 2065, mencerminkan tingkat kelahiran yang konsisten rendah. Sementara itu, kelompok usia kerja (15–64 tahun) juga mengalami penurunan signifikan, dari 77,28 juta menjadi 45,29 juta, yang memicu kekhawatiran mengenai ketersediaan tenaga kerja produktif di masa depan. Sebaliknya, populasi lansia (65 tahun ke atas) meningkat, mencapai puncaknya pada 2042 sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 38,4% dari total populasi pada 2065.

Tren *childfree* ini membawa berbagai tantangan, terutama terkait rasio ketergantungan usia. Rasio ketergantungan lansia diproyeksikan meningkat tajam, dari dua pekerja mendukung satu lansia pada 2015 menjadi hanya 1,3 pekerja per lansia pada 2065, yang akan menambah beban ekonomi pada generasi usia kerja. Selain itu, penurunan jumlah tenaga kerja dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya tekanan pada sistem pensiun dan perawatan kesehatan. Berikut proyeksi jumlah penduduk Jepang pada tahun 2016 sampai pada tahun 2065.



Gambar 1. Proyeksi Tren Pertumbuhan Populasi Jepang (2015-2065)

Sumber: National Institute of Population and Social Security Research, 2017

Hasil proyeksi perkiraan jumlah penduduk Jepang pada Gambar 1. menunjukkan sebuah ancaman dan tantangan nasional yang akan dihadapi negara Jepang di masa depan. Pemerintah Jepang telah menyadari dampak

dari tren *childfree* ini dan berusaha untuk mengatasi masalah demografis melalui berbagai kebijakan. Beberapa inisiatif yang telah diluncurkan termasuk program insentif untuk keluarga yang memiliki anak, peningkatan akses ke layanan penitipan anak, dan promosi keseimbangan kerja-hidup. Namun, meskipun terdapat upaya tersebut, tantangan tetap ada dan banyak pasangan masih merasa bahwa memiliki anak bukanlah pilihan yang realistis, banyak orang dewasa muda memprioritaskan pengembangan karir dibanding pembentukan keluarga.

Kebijakan pemerintah Jepang terhadap kondisi demografis akibat tren *childfree* mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi keluarga. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang alasan di balik tren *childfree* dan bagaimana kebijakan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fenomena ini memiliki implikasi yang lebih luas bagi masa depan Jepang, termasuk potensi kekurangan akan tenaga kerja dan tekanan pada sistem kesejahteraan sosial.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai kondisi demografis akibat tren *childfree*, terdapat rumusan masalah yang perlu diperhatikan. Mencari dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong individu dan pasangan di Jepang untuk memilih gaya hidup *childfree*, serta bagaimana keputusan ini berkontribusi terhadap penurunan angka kelahiran di negara tersebut. Selanjutnya, dampak dari kebijakan pemerintah Jepang dalam mengatasi penurunan populasi akibat tren *childfree* perlu dianalisis, terutama dalam hal pengaruhnya terhadap struktur demografi Jepang. Oleh karena itu, rumusan yang diajukan adalah: **Bagaimana cara pemerintah Jepang membuat kebijakan terhadap tren *childfree* di Jepang?**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan, terutama :

- a. Menganalisis cara pemerintah Jepang dalam membuat kebijakan tentang demografis
- b. Menganalisis kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi masalah tren *childfree*

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, antara lain:

- a. Manfaat Akademis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kebijakan pemerintah Jepang mengenai tren *childfree*.
- b. Manfaat Praktisi : Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bahwa tren *childfree* ini sangat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan, menjadi sebuah tren budaya yang dapat meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai dan norma di masyarakat, serta pola pikir individu.
- c. Manfaat Lainnya : Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat serta menjadi referensi bagi mahasiswa dan penelitian lain dalam bidang analisis kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dan dapat menumbuhkan pemahaman lebih mendalam tentang kehidupan berkeluarga dan masyarakat yang terus berkembang.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau *literatur review* berguna untuk membantu memahami konteks teoritis dalam dari topik yang diteliti, penelitian terdahulu

atau *literatur review* juga berfungsi untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian (Galvan L. Jose, 2024). Penelitian terdahulu dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman mendalam atau gambaran umum dengan mengkaji hasil dari penelitian terdahulu, kajian pustaka ini juga dapat mengidentifikasi celah dalam penelitian terdahulu yang akan membantu dalam merumuskan kerangka pemikiran dan memberikan hasil yang akurat mengenai pentingnya penelitian dilakukan (Galvan L. Jose, 2024). Selain itu, penelitian terdahulu atau *literatur review* juga berperan dalam menentukan metodologi yang tepat serta menyusun argumen yang mendukung hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan *literatur review* sebagai gambaran umum mengenai kondisi dan tantangan dalam sektor demografis di Jepang akibat dampak dari tren *childfree*.

Pertama, penulis melakukan analisis penelitian terdahulu yang dibuat oleh Neal & Neal (2024), penelitian yang dilakukan oleh Neal ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi estimasi pemikiran orang dewasa tanpa anak (*childfree adults*), yaitu individu yang tidak memiliki anak dan tidak menginginkan anak. Kelompok ini berbeda dari mereka yang tidak memiliki anak karena alasan medis atau sosial (*childless adults*), atau mereka yang masih mempertimbangkan untuk memiliki anak di masa depan (*non-parents*). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis 83 estimasi dari survei nasional Jepang yang dilakukan antara tahun 2000 hingga 2021. Data diambil dari berbagai sumber resmi, termasuk survei pemerintah dan konsorsium internasional, dengan responden berusia antara 18 hingga 50 tahun. Penelitian menggunakan pendekatan *meta-regression* untuk memahami pengaruh variabel seperti jenis kelamin, status pernikahan, waktu pengumpulan data, serta formulasi pertanyaan survei terhadap estimasi perkiraan.

Hasil penelitian dari Neal & Neal menunjukkan bahwa pemikiran dari *childfree adults* lebih tinggi pada wanita dibanding pria, dengan kemungkinan wanita melaporkan diri sebagai *childfree* meningkat sekitar 20% dibanding pria. Selain itu, orang yang lajang cenderung hampir lima kali lebih mungkin memilih untuk tidak memiliki anak dibandingkan mereka yang menikah.

Faktor waktu juga memainkan peran penting, di mana data yang dikumpulkan pada tahun-tahun yang lebih baru menunjukkan pemikiran seorang dewasa untuk melakukan *childfree* yang lebih tinggi. Setiap tahun setelah 2000, prevalensi *childfree adults* meningkat sekitar 2,7%. Formulasi pertanyaan survei juga memengaruhi hasil, di mana pertanyaan tentang ekspektasi yang menanyakan apakah responden memperkirakan akan memiliki anak menghasilkan hasil dua kali lebih tinggi dibandingkan pertanyaan tentang keinginan untuk memiliki anak. Pada tahun 2020, sekitar 5,64% populasi Jepang berusia 18 hingga 50 tahun, atau sekitar 2,5 juta orang, termasuk dalam kategori *childfree*. Hasil tertinggi ditemukan pada wanita lajang, dengan angka mencapai 10,71%, sementara pria menikah menunjukkan hasil terendah sebesar 2,08% (Neal & Neal, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Wang. Y (2023) menunjukkan fenomena *childlessness* atau tidak memiliki anak di Jepang menjadi masalah besar yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Semakin banyak pasangan memilih untuk tidak memiliki anak, dan ini menyebabkan angka kelahiran menurun drastis. Masalah ini berdampak pada berkurangnya jumlah tenaga kerja, meningkatnya tekanan pada sistem pensiun, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi negara. Untuk memahami fenomena ini, penelitian ini menganalisis berbagai penyebab utama, termasuk budaya tradisional, situasi ekonomi, pengaruh budaya populer, serta tekanan sosial yang dialami generasi muda Jepang.

Menurut Wang Y, jika dilihat dari sudut pandang budaya, Jepang memiliki tradisi yang sangat kuat, di mana pria dianggap sebagai pencari nafkah utama, sementara wanita diharapkan menjadi pengasuh keluarga. Tradisi ini membuat banyak wanita Jepang merasa terbatas, terutama mereka yang ingin mengejar karier atau mencari kemandirian pribadi. Saat ini, semakin banyak wanita Jepang yang menghargai kebebasan dan pengembangan diri, sehingga mereka memilih untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan dan memiliki anak. Selain itu, struktur keluarga di Jepang telah berubah dari keluarga besar yang saling mendukung menjadi

keluarga inti, di mana tanggung jawab ekonomi dan sosial lebih banyak dibebankan kepada pasangan muda. Hal ini membuat banyak pasangan merasa terlalu terbebani untuk memulai keluarga. Generasi muda Jepang juga memiliki pandangan baru tentang hubungan, di mana mereka menginginkan pasangan yang setara dalam tanggung jawab rumah tangga dan karier. Namun, perubahan menuju norma-norma ini berjalan lambat, sehingga banyak orang merasa pernikahan dan menjadi orang tua bukanlah sebuah pilihan yang baik..

Selanjutnya melakukan literatur *review* terhadap penelitian dari Nemoto (2008), penelitian yang dilakukan oleh Nemoto dan Kumiko yang mengambil teori tentang feminisme dengan fokus pada pandangan Perempuan Jepang mengenai pernikahan dan juga pekerjaan. Di negara Jepang ketidaksetaraan gender masih menjadi sebuah isu yang signifikan, riset ini berusaha untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya mempengaruhi keputusan Perempuan untuk menunda pernikahan. Riset ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam dengan total 40 warga Jepang (26 wanita dan 14 pria) di penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan gender yang terus mempengaruhi keputusan perempuan untuk menunda pernikahan.

Beberapa responden mengungkapkan keinginan untuk menikah dan memiliki anak, namun mereka juga merasakan bahwa pernikahan sering kali menghambat otonomi dan perkembangan karier mereka. Dalam wawancara, perempuan-perempuan ini menyatakan bahwa mereka merasa terjebak dalam norma-norma tradisional yang mengharuskan mereka untuk mengambil tanggung jawab penuh dalam rumah tangga dan pengasuhan anak. Hal ini menciptakan ketegangan antara keinginan untuk membangun karier yang sukses atau harapan untuk membentuk sebuah keluarga.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Kubo (2019) Kubo dan Tomoko meneliti tentang ketimpangan kondisi hidup di wilayah metropolitan Tokyo, khususnya antara pusat kota yang berkembang pesat dan pinggiran yang mengalami penyusutan populasi serta penuaan penduduk. Buku ini

mengeksplorasi transformasi struktural Tokyo melalui lensa globalisasi, kebijakan neoliberal, perubahan demografis, dan dinamika pasar perumahan.

Pada bagian awal, Kubo membahas latar belakang penelitian yang mencakup diskusi tentang globalisasi, kebijakan perumahan neoliberal, dan konsep "kota terbagi" yang mengacu pada segregasi spasial dan sosial-ekonomi. Tokyo, sebagai kota global, mengalami pertumbuhan di pusat kota melalui proyek pembaruan urban seperti pengembangan kondominium tinggi, sementara wilayah pinggiran menghadapi penurunan populasi, peningkatan rumah kosong, dan penuaan penduduk. Buku ini juga menyoroti konsep "kota menyusut" (*shrinking cities*) dan tantangan keadilan sosial dalam lingkungan permukiman..

Literatur selanjutnya menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dkk (2022) penelitian yang dilakukan oleh Nugroho ini mengkaji tren *childfree* (orang yang memilih untuk tidak memiliki anak) dan tren *unmarried* (tidak menikah) di kalangan masyarakat Jepang, khususnya di daerah perkotaan, serta dampaknya terhadap penurunan pertumbuhan penduduk. Dampak dari tren ini terhadap kependudukan Jepang sangat mengkhawatirkan. Tingkat kesuburan (*fertility rate*) Jepang tercatat hanya 1,4 anak per perempuan jauh di bawah angka pengganti populasi (2,1). Jika tren ini terus berlanjut, populasi Jepang diprediksi menyusut dari 125 juta (2022) menjadi sekitar 88 juta pada 2065, dengan lebih dari 40% penduduk berusia di atas 65 tahun. Hal ini berpotensi memicu krisis ekonomi akibat kurangnya tenaga kerja produktif, meningkatnya biaya jaminan sosial untuk lansia, dan melemahnya daya saing global.

Pemerintah Jepang telah merespons dengan berbagai kebijakan, seperti program *Ikumen* (mendorong peran ayah dalam pengasuhan anak), subsidi pernikahan, dan *omiai* (perjodohan tradisional). Namun, upaya ini dinilai kurang efektif karena tidak menyentuh akar masalah, seperti ketimpangan gender di tempat kerja, budaya korporasi yang eksploitatif, dan kurangnya dukungan infrastruktur bagi keluarga muda. Misalnya, perusahaan-perusahaan di Jepang masih enggan memberikan cuti parental

yang memadai, sementara stigma sosial terhadap perempuan yang kembali bekerja setelah melahirkan tetap tinggi.

Tabel 1. Komparasi Penelitian

	Tujuan Penelitian	Teori dan Metodologi	Hasil Penelitian
Neal Z & Neal J	Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi orang dewasa untuk <i>childfree</i> .	Penelitian ini menggunakan kerangka <i>WIDE (want, ideal, direct, expect)</i> untuk mengklasifikasikan jenis pertanyaan yang diajukan dalam survei terkait dengan keputusan untuk tidak memiliki anak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi orang dewasa <i>childfree</i> lebih tinggi dalam sampel yang terdiri dari perempuan dibandingkan laki-laki, pada individu yang belum menikah dibandingkan yang sudah menikah, dalam survei yang lebih baru
Wang Y	Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena ketidakpunyaan anak (<i>childlessness</i>) di Jepang, termasuk penyebabnya. Fokus utama penelitian ini adalah pada dampak penurunan angka kelahiran dan meningkatnya jumlah pasangan tanpa anak yang berpotensi menyebabkan tantangan demografis besar di Jepang.	Penelitian ini menggunakan perspektif budaya, ekonomi, dan sosial untuk menjelaskan fenomena <i>childlessness</i> di Jepang dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang menggabungkan pendekatan tinjauan pustaka sistematis dan penyelidikan empiris.	Hasil penelitian menunjukkan penurunan angka kelahiran di Jepang adalah fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang menyeluruh dan berbasis kebijakan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pernikahan dan keinginan untuk memiliki anak. Penerapan kebijakan yang mendukung keluarga serta perubahan budaya mengenai peran.

	Tujuan Penelitian	Teori dan Metodologi	Hasil Penelitian
Nemoto & Kumiko	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan wanita Jepang tentang penundaan pernikahan, dengan fokus pada alasan mengapa banyak wanita yang memilih untuk menunda atau menghindari pernikahan	Penelitian ini menggunakan teori feminis untuk menganalisis bagaimana norma sosial dan ekspektasi gender mengarah pada penundaan pernikahan, terutama bagi wanita dengan pendidikan tinggi dan karier yang mapan. Dan melakukan wawancara mendalam dengan 26 wanita Jepang yang berpendidikan tinggi dan bekerja penuh waktu.	Hasil penelitian menunjukkan Penundaan pernikahan di Jepang dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap ketimpangan gender yang masih kuat di masyarakat, baik di tempat kerja maupun dalam keluarga. Wanita-wanita yang diwawancarai dalam penelitian ini melihat pernikahan sebagai hambatan untuk otonomi pribadi dan karier. Mereka menginginkan perubahan sosial yang memungkinkan pernikahan yang setara
Kubo & Tumoko	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena ketimpangan sosial dan kondisi tempat tinggal terutama perbedaan yang semakin besar antara pusat kota dan pinggiran yang menurun. Fokus utama adalah bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah Jepang	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang terfokus pada Tokyo, dengan menggunakan data dari literatur terkait dan berbagai observasi tentang perubahan kondisi perumahan dan kehidupan sosial di pusat kota dan pinggiran Tokyo	Hasil penelitian menunjukkan Penelitian ini menunjukkan bahwa Tokyo sedang menghadapi kesenjangan sosial yang semakin besar antara pusat kota yang berkembang pesat dan pinggiran kota yang menyusut. Penyebab utama ketimpangan ini adalah perubahan kebijakan perumahan, globalisasi, dan peningkatan permintaan untuk kehidupan di pusat kota. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis sosial untuk meremajakan pinggiran kota dan mengatasi penyusutan penduduk serta perumahan kosong.

	Tujuan Penelitian	Teori dan Metodologi	Hasil Penelitian
Nugroho, dkk.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tren <i>childfree</i> dan <i>unmarried</i> di kalangan masyarakat Jepang, yang berkembang khususnya di daerah perkotaan	Penelitian ini menggunakan teori feminisme untuk menjelaskan fenomena <i>childfree</i> dan <i>unmarried</i> . Feminisme dianggap memberikan ruang lebih bagi wanita Jepang untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam hal pernikahan dan memiliki anak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren ini muncul sebagai respons terhadap diskriminasi gender, tekanan budaya patriarki, dan tingginya biaya hidup di perkotaan. Perempuan Jepang, yang kerap dibebani peran domestik dan menghadapi ketidaksetaraan di dunia kerja, memilih menunda atau menolak pernikahan serta memiliki anak untuk mengejar karier dan kebebasan pribadi. sumber daya manusia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang terbagi ke dalam dua bagian. Setelah menguraikan landasan konseptual yang terdiri dari konsep kebijakan publik serta teori *policy cycle*, pada bagian kedua akan dipaparkan kerangka pemikiran yang bertujuan untuk menciptakan alur pikir yang diterapkan dalam penelitian ini serta memberikan gambaran mengenai analisis kebijakan pemerintah Jepang akibat tren *childfree*.

2.1. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan sebagai pengantar teori dalam penelitian skripsi, yang akan diuraikan berbagai teori dan konsep yang relevan terkait analisis kebijakan pemerintah Jepang terhadap kondisi demografis akibat tren *childfree*. Untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan teori yang digunakan untuk membantu penelitian ini, diantaranya adalah konsep kebijakan publik dan teori *policy cycle*.

2.2.1. Konsep Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik pertama kali muncul sebagai fenomena di Amerika Serikat dan kemudian menyebar ke negara-negara di Eropa, seperti Kanada, Belanda, dan Inggris. Ilmu kebijakan publik pertama kali dikenalkan oleh Harold D. Lasswell di akhir tahun 1940-an dan awal 1950-an

dengan judul “*The Policy*” (Feronica et al., 2023). Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan (Feronica et al., 2023).

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (Suwitri, 2010). Publik berasal dari kata *public* diartikan beranekaragam dalam bahasa Indonesia, tergantung pada kata yang menyertainya. Diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, dan negara atau pemerintahan. Begitu banyaknya makna yang terkandung dalam kata publik beragam namun tersirat satu hal penting yaitu dalam kata publik harus berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat. Karena itulah *public policy* tidak diterjemahkan sebagai kebijakan negara melainkan kebijakan publik, sebab *public policy* harus berorientasi pada kepentingan publik (Suwitri, 2010).

Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing (Suwitri, 2010). Kata publik dalam kebijakan publik mengandung pengertian bahwa kebijakan tersebut berasal dari publik, disusun oleh publik dan berlaku untuk publik. Dengan demikian, kebijakan publik sangat erat berhubungan dengan kepentingan publik. Kebijakan publik bukanlah sesuatu yang hampa nilai, melainkan sarat nilai. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat merupakan kepentingan masyarakat atau kepentingan publik, akan menjadi desakan bagi pemerintah sebagai wakil-wakil masyarakat untuk memformulasikan dan mewujudkan dalam suatu kebijakan publik (Suwitri, 2010).

Ketika berbicara tentang kebijakan publik, hal itu tidak terlepas dari keberadaan pemerintah di setiap negara di dunia. Berbagai permasalahan di masyarakat tentu membutuhkan perhatian pemerintah, begitu juga dengan yang dialami oleh negara Jepang saat ini yang dimana banyaknya individu Jepang memilih untuk fokus terhadap diri sendiri dibanding untuk berkeluarga, yang menyebabkan penurunan populasi dan mengakibatkan masalah di bidang demografi di Jepang.

2.2.2. Teori Policy Cycle

Teori *policy cycle* adalah model teoritis yang menggambarkan pembuatan kebijakan publik sebagai serangkaian tahapan berulang dan saling terkait. Model ini berfungsi sebagai alat analitis untuk memudahkan pemahaman tentang bagaimana masalah masuk ke agenda pemerintah, diubah menjadi kebijakan formal, diimplementasikan, dan akhirnya dievaluasi atau direvisi. Meskipun tahapannya sering direpresentasikan secara linear (*agenda setting*, formulasi, pengambilan keputusan, implementasi, evaluasi, dan revisi), para pengkritik mencatat bahwa proses kebijakan nyata cenderung bersifat iteratif, non-linear, dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan politik atau krisis mendadak. Teori ini tidak hanya membantu akademisi mengidentifikasi aktor kunci dan dinamika di setiap tahap, tetapi juga menjadi panduan bagi praktisi dalam merancang kebijakan yang lebih terstruktur (Howlett Michael & Ramesh M., 2003).

Proses pembuatan kebijakan publik sering kali dihadapkan pada kompleksitas masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dinamis. Seiring berkembangnya ilmu ini pada abad ke-20, para ahli mencari kerangka konseptual untuk memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Teori *policy cycle* (siklus kebijakan) muncul sebagai respons terhadap kebutuhan ini, terutama untuk memetakan tahapan kebijakan secara sistematis. Model ini dipengaruhi oleh tradisi analitis yang berusaha memecah proses kebijakan menjadi fase-fase terpisah,

meskipun dalam praktiknya tahapan tersebut saling tumpang tindih dan tidak selalu linear (Fischer et al., 2007).

Proses *policy cycle* terdiri dari lima tahapan yaitu, penentuan agenda (*agenda setting*), di mana masalah publik diidentifikasi dan diangkat sebagai prioritas pemerintah melalui tekanan media atau masyarakat. Setelah itu, masuk ke tahap perumusan kebijakan (*policy formulation*), di pemerintah merancang solusi, misalnya dengan menyusun sebuah kebijakan terkait masalah yang ada. Kemudian, pengambilan keputusan (*decision-making*), dilakukan melalui proses politik. Tahap implementasi (*implementation*), melibatkan pelaksanaan kebijakan oleh instansi terkait. Selanjutnya, evaluasi (*evaluation*), dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan (Howlett Michael & Ramesh M., 2003).

Setiap tahap dalam siklus ini memiliki peran yang krusial dan saling terkait, menciptakan suatu dinamika yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk merespons isu-isu yang muncul dalam masyarakat. Pada tahap identifikasi masalah, para pembuat kebijakan harus memahami dan menganalisis isu yang perlu diatasi, yang sering kali melibatkan pengumpulan data dan konsultasi dengan berbagai pihak. Setelah masalah diidentifikasi, tahap perumusan kebijakan dimulai, di mana berbagai alternatif solusi dikembangkan dan dianalisis. Pengambilan keputusan merupakan tahap di mana pilihan kebijakan yang paling sesuai dipilih, sering kali melibatkan negosiasi dan kompromi antara kepentingan. Implementasi kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang telah disetujui diterapkan dalam praktik, yang sering kali menghadapi tantangan dan hambatan di lapangan. Terakhir, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan, memberikan umpan balik yang penting untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dengan memahami siklus ini, para pembuat kebijakan dapat lebih efektif dalam merespons tantangan yang muncul dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Teori *policy cycle* juga menekankan pentingnya keterlibatan

masyarakat dan transparansi dalam setiap tahap, yang dapat meningkatkan legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan yang diambil (Howlett Michael & Ramesh M., 2003).

Dalam konteks global yang terus berubah, pemahaman yang mendalam tentang siklus kebijakan menjadi semakin penting untuk menciptakan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks, contoh dari masalah yang dialami oleh negara Jepang ialah tren *childfree* yang dimana ini ada salah satu efek globalisasi, Masalah *childfree* di Jepang telah menjadi isu sosial yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan perubahan nilai dan prioritas dalam masyarakat. Fenomena ini merujuk pada keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tekanan ekonomi, ketidakpastian karier, dan perubahan dalam pandangan terhadap peran gender (Nemoto, 2008).

Dalam konteks negara Jepang, di mana budaya kerja yang intens dan harapan sosial yang tinggi sering kali membebani individu, banyak orang merasa bahwa memiliki anak dapat mengganggu pencapaian pribadi dan profesional mereka. Selain itu, biaya hidup yang tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Tokyo, juga menjadi pertimbangan penting bagi pasangan muda yang mempertimbangkan untuk memiliki anak (Raymo et al., 2020).

Teori *policy cycle* digunakan sebagai alat analitis yang berguna untuk mempelajari kebijakan publik, meski perlu diadaptasi dengan realitas dinamika politik, sosial, dan teknis yang kompleks.

2.2. Kerangka Pemikiran

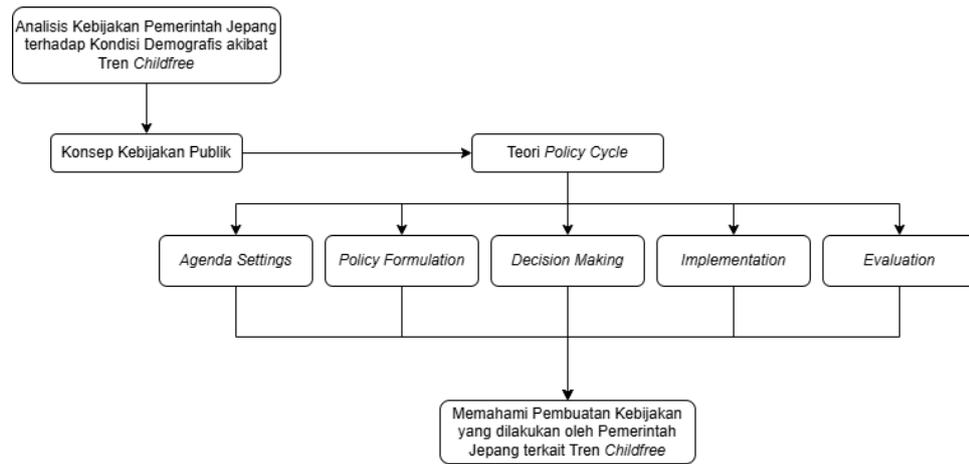
Kerangka pemikiran dalam penelitian “Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Kondisi Demografis Akibat Tren *Childfree*” akan berfokus pada bagian demografis Jepang yang selalu menurun tiap tahun dan mengakibatkan masalah nasional di bagian perekonomian Jepang. Sebagai

aktor utama negara maju yang berada di Asia, ekonomi dan budaya merupakan salah satu fondasi penting dari sebuah negara maju yang tentunya pemerintah Jepang harus tau cara mengatasi masalah hal ini dan memberikan solusi agar masalah penurunan angka kelahiran ini dapat teratasi.

Analisis ini didasari pada konsep kebijakan public dan teori *policy cycle* (siklus kebijakan), teori dan konsep ini nantinya akan membantu dalam memahami dan mengevaluasi dampak dari tren *childfree* ini. Penelitian juga akan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan seorang individu untuk tidak memiliki anak (*childfree*), termasuk perubahan nilai-nilai sosial, tekanan ekonomi, dan juga kondisi kehidupan yang semakin hari makin kompleks.

Dengan menggunakan pendekatan konsep dan teori yang ada, penelitian ini akan mengidentifikasi dampak dari tren *childfree* terhadap populasi Jepang, seperti penurunan angka kelahiran, penuaan populasi, dan potensi kekurangan tenaga kerja di masa depan. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan peran pemerintah dan kebijakan yang ada dalam merespons fenomena *childfree*, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat memengaruhi keputusan individu dan pasangan dalam hal memiliki anak. Selain itu, peran aktor eksternal, seperti influencer dan komunitas, akan dianalisis untuk memahami masalah yang lebih luas dari tren ini.

Melalui kerangka pemikiran ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenai pengaruh tren *childfree* terhadap demografis Jepang, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di negara ini.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Diolah oleh penulis

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menyediakan penjelasan metodologis yang digunakan oleh peneliti. Bab ini terbagi ke dalam lima bagian, yaitu: jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis institusional, dengan fokus penelitian yaitu pada kondisi demografis Jepang yang selalu menurun. Sumber data yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sumber-sumber sekunder. Data dan fakta dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan teknik tematik, untuk kemudian disajikan dan ditarik kesimpulannya berdasarkan data yang diperoleh.

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif (Rita Fiantika et al., 2022). Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan institusional, dengan hal ini penelitian menggabungkan metode kualitatif (seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen) dengan fokus analisis pada peran institusi (lembaga, organisasi, atau sistem) dalam membentuk perilaku, kebijakan, atau fenomena sosial (Friedland, 2012).

Pendekatan institusional dalam penelitian merujuk pada pendekatan yang berfokus pada studi tentang organisasi atau institusi sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami struktur, proses, dan dinamika dalam institusi tertentu, seperti perusahaan, lembaga pendidikan, pemerintahan, atau organisasi non-pemerintah, serta bagaimana institusi tersebut beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungannya (Friedland, 2012).

Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis kebijakan, praktik, budaya, dan perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi atau institusi pemerintah, pendekatan bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan dan implementasinya di dalam suatu organisasi atau institusi (Friedland, 2012). Dengan begitu, tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan institusional ditujukan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai kebijakan pemerintah Jepang terhadap tren *childfree*, beserta tantangan yang dihadapi oleh Jepang akibat tren ini. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu penulis dalam mengeksplorasi lebih banyak tentang kebijakan pemerintah Jepang.

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada kondisi yang terjadi pada Jepang akhir-akhir ini, dimana pada saat ini Jepang mengalami angka kelahiran yang sangat menurun dan tentunya ini merupakan sebuah masalah nasional yang harus diatasi. Berdasarkan hasil observasi tantangan yang harus diatasi Jepang, tidak lain terkait dengan perubahan demografis, seperti penurunan angka kelahiran, penuaan populasi, dan dampaknya terhadap pasar tenaga kerja.

Fokus penelitian akan menganalisis keterkaitan masalah *childfree* dengan fokus pada kebijakan pemerintah Jepang. Dari tahun 2015 sampai sekarang Jepang selalu mengalami penurunan angka kelahiran dan diprediksi akan tetap mengalami penurunan angka kelahiran sekitar 30% pada tahun

2065. Turunnya angka kelahiran secara terus-menerus berarti populasi Jepang menjadi sebuah masalah nasional di Jepang.

3.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai jenis dokumen. Menurut Creswell. W. John (2018), didalam penelitian kualitatif sumber data dapat berupa dokumen resmi pemerintah, laporan hasil wawancara ataupun observasi video resmi, portal berita online, laporan resmi, jurnal nasional dan internasional, dan berbagai sumber data lainnya. Dengan semua data yang ada kemudian peneliti akan melakukan tinjauan dan menjadikannya sebagai informasi tambahan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mengenai analisis terhadap tren budaya *childfree* yang ada di Jepang akan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data ini berbentuk tulisan, gambar, adapun juga karya tulis dari seseorang (Rita Fiantika et al., 2022). Studi dokumen merupakan gabungan dari hasil observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, dokumen berguna sebagai bukti suatu pengujian.

Dalam mendukung penelitian ini, penulis memanfaatkan data yang telah dianalisis oleh peneliti sebelumnya, dengan menggunakan berbagai sumber sekunder. Sumber sekunder yang dimaksud berupa buku yang memuat teori teori yang sudah diteliti sehingga menimbulkan sebuah perspektif baru.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis transkrip, catatan lapangan, dan materi lain yang peneliti kumpulkan untuk memungkinkan peneliti menemukan temuan (Rita Fiantika et al., 2022). Analisis ini mencakup proses pengolahan data dan membaginya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, pembagian ini penting untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang terdapat dalam setiap unit. Proses analisis juga menggunakan teknik analisis tematik yaitu metode untuk mengembangkan, menganalisis, dan menafsirkan pola di seluruh kumpulan data kualitatif, yang melibatkan proses sistematis untuk mengembangkan tema (Braun & Clarke, 2022).

Dengan memperhatikan pola-pola ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pola-pola tersebut dapat berupa kesamaan, perbedaan, atau hubungan antara berbagai elemen dalam data, yang semuanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian.

Dengan begitu, analisis data tidak hanya sekadar mengolah informasi, tetapi juga merupakan upaya untuk menemukan makna dan konteks yang lebih luas dari data yang ada, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan fakta di lapangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan simpulan dan saran yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Pada bagian simpulan, peneliti akan memaparkan jawaban dari pertanyaan penelitian ini. Peneliti juga akan menguraikan poin-poin utama dari fenomena banyaknya individu yang melakukan *childfree* dan kebijakan pemerintah Jepang yang telah dibuat. Pada bagian selanjutnya, saran agar pemerintah Jepang bisa mengatasi masalah demografis ini.

5.1. Kesimpulan

Fenomena *childfree* di Jepang telah menjadi isu sosial utama, dengan implikasi signifikan bagi demografi dan masa depan ekonomi negara tersebut. Selama beberapa dekade terakhir, Jepang telah mengalami penurunan angka kelahiran yang terus-menerus, yang menyebabkan populasi yang menua dan proyeksi pengurangan jumlah populasi total. Pada tahun 2022, angka kelahiran Jepang mencapai 1,26 anak per wanita, jauh di bawah tingkat penggantian sebesar 2,1. Proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2065, populasi Jepang dapat menyusut dari 127 juta menjadi 88 juta, dengan hampir 40% populasi berusia lanjut. Pergeseran demografi ini menimbulkan tantangan besar bagi ekonomi, layanan sosial, dan keberlanjutan tenaga kerja Jepang.

Keputusan untuk mengadopsi gaya hidup tanpa anak di Jepang didorong oleh berbagai faktor, khususnya tekanan ekonomi. Tingginya biaya hidup di wilayah metropolitan besar seperti Tokyo dan Osaka membuat

banyak anak muda kesulitan secara finansial untuk memulai keluarga. Biaya perumahan, pendidikan, dan pengasuhan anak, ditambah dengan pola pekerjaan yang tidak tetap, telah menciptakan lingkungan yang menantang bagi banyak orang untuk mencapai stabilitas keuangan yang dibutuhkan untuk kehidupan keluarga. Selain itu, banyak pasangan muda yang terhalang oleh ketidakpastian prospek karier dan kesulitan dalam menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan keluarga, terutama mengingat budaya kerja dan jam kerja yang panjang di Jepang. Faktor lain yang berkontribusi terhadap tren *childfree* ini ialah bergesernya nilai-nilai sosial dan perubahan norma gender. Secara tradisional, Jepang memiliki struktur patriarki di mana laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah dan perempuan sebagai pengasuh utama. Meskipun peran gender tradisional ini telah ditantang dalam beberapa tahun terakhir, banyak perempuan masih merasa bahwa tanggung jawab membesarkan anak dan mengelola rumah tangga masih terlalu besar bagi mereka. Akibatnya, banyak perempuan lebih memilih untuk fokus pada karier, pengembangan pribadi, dan kemandirian finansial mereka daripada menikah atau memulai keluarga. Pergeseran nilai-nilai ini, dikombinasikan dengan tekanan ekonomi, telah berkontribusi pada semakin banyaknya individu yang memilih gaya hidup *childfree*.

Sebagai respons terhadap krisis demografi, pemerintah Jepang telah memperkenalkan beberapa kebijakan yang dirancang untuk mengatasi penurunan angka kelahiran dan mendukung keluarga. Kebijakan tersebut meliputi insentif finansial seperti tunjangan anak, peningkatan akses ke fasilitas penitipan anak, dan reformasi kebijakan cuti orang tua. Misalnya, pemerintah telah memperluas ketersediaan layanan penitipan anak dan meningkatkan kebijakan keseimbangan kehidupan kerja dengan menawarkan cuti orang tua bagi ibu dan ayah. Namun, terlepas dari upaya tersebut, dampak kebijakan tersebut terhadap angka kelahiran masih terbatas, karena banyak anak muda masih merasa bahwa memiliki anak bukanlah pilihan yang realistis mengingat lingkungan sosial dan ekonomi saat ini.

Keterbatasan efektivitas kebijakan pemerintah menyoroti perlunya reformasi yang lebih komprehensif. Meskipun insentif finansial bermanfaat,

insentif tersebut tidak cukup untuk mengatasi masalah budaya dan struktural yang mendasari yang berkontribusi pada tren tanpa anak. Untuk membalikkan penurunan demografi secara efektif Jepang harus melakukan perubahan sosial yang lebih mendalam, khususnya dalam hal kesetaraan gender, keseimbangan kehidupan kerja, dan normalisasi tanggung jawab bersama dalam membesarkan anak. Misalnya, Jepang perlu mengubah budaya kerjanya dengan mengurangi jam kerja yang panjang dan memastikan bahwa baik pria maupun wanita memiliki kesempatan yang sama untuk menyeimbangkan karier dan kehidupan keluarga. Dan perlu ada perubahan dalam ekspektasi dan nilai-nilai masyarakat seputar peran keluarga dan gender. Ini termasuk mempromosikan partisipasi yang lebih setara dalam tanggung jawab rumah tangga dan mengubah persepsi tentang peran sebagai orang tua, membuatnya lebih mudah diakses dan tidak terlalu membebani bagi pasangan muda.

Selain itu, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dengan tidak hanya meningkatkan dukungan finansial tetapi juga membina lingkungan di mana kehidupan keluarga dipandang sebagai tujuan yang berharga dan dapat dicapai. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang menyediakan perumahan yang lebih terjangkau, keamanan kerja yang lebih baik, dan dukungan yang lebih besar bagi orang tua yang bekerja. Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender di tempat kerja, seperti cuti orang tua yang lebih adil bagi pria dan wanita dan inisiatif untuk mengurangi stigma seputar pria yang mengambil peran pengasuhan. Tren *childfree* di Jepang juga mencerminkan pergeseran nilai global yang lebih luas, termasuk perubahan sikap terhadap pernikahan, keluarga, dan kebebasan individu. Fenomena ini bukan sekadar cerminan tantangan budaya dan ekonomi Jepang yang unik, tetapi juga bagian dari gerakan global yang lebih besar menuju individualisme dan otonomi pribadi. Akan tetapi, situasi demografi Jepang lebih mendesak daripada banyak negara lain, karena populasi yang menua dengan cepat dan tenaga kerja yang menyusut menghadirkan ancaman langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi negara tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh tren *childfree* dan dampaknya terhadap situasi demografi Jepang. Pertama, meskipun Jepang telah menerapkan kebijakan seperti tunjangan pengasuhan anak dan cuti orang tua untuk mendorong kelahiran, dampaknya masih terbatas. Diperlukan pendekatan yang lebih lanjut, pendekatan yang tidak hanya meningkatkan dukungan finansial tetapi juga mengatasi faktor struktural dan budaya yang berkontribusi terhadap rendahnya angka kelahiran. Memperluas subsidi untuk pengasuhan anak dan perumahan, bersamaan dengan memperkenalkan jam kerja yang lebih fleksibel, dapat secara signifikan membantu keluarga menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga secara lebih efektif.

Selain itu, kesetaraan gender tetap menjadi tantangan signifikan di Jepang, terutama dengan peran gender tradisional yang masih mengakar kuat. Upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah keluarga, di mana baik pria maupun wanita berbagi tanggung jawab yang sama dalam membesarkan anak harus diprioritaskan. Ini termasuk mempromosikan cuti ayah dan menantang ekspektasi masyarakat yang menempatkan sebagian besar tanggung jawab membesarkan anak pada wanita. Kebijakan yang lebih agresif diperlukan untuk mengalihkan fokus ke arah pembagian tanggung jawab rumah tangga yang lebih seimbang.

Selanjutnya perubahan budaya diperlukan untuk mengatasi tren *childfree* yang semakin meningkat. Karena banyak anak muda di Jepang memprioritaskan pengembangan karier dan kebebasan pribadi, pemerintah harus berupaya mengubah persepsi publik tentang kehidupan keluarga. Kampanye pendidikan publik dapat membantu menekankan pentingnya keluarga dan menunjukkan bahwa karier dan kehidupan keluarga dapat diselaraskan. Kampanye ini, dikombinasikan dengan insentif finansial untuk

mendorong generasi muda mempertimbangkan kembali pembentukan keluarga sebagai pilihan yang layak dan diinginkan.

Dalam hal perawatan lansia, Jepang menghadapi tantangan yang signifikan karena populasinya yang menua dengan cepat. Sistem pendukung yang lebih lanjut untuk perawatan lansia sangat penting untuk mengurangi beban pada generasi muda. Menetapkan sistem perawatan yang terjangkau dan mudah diakses akan meringankan tekanan mental dan finansial yang terkait dengan perawatan orang tua yang menua, yang dapat menjadi penghalang untuk memulai sebuah keluarga. Reformasi sosial jangka panjang juga harus dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan yang mendukung pembentukan keluarga. Kebijakan tidak hanya harus memberikan insentif jangka pendek tetapi juga fokus pada penciptaan keamanan kerja, keseimbangan kehidupan kerja, dan sistem pendukung yang memadai bagi keluarga di seluruh wilayah Jepang. Perhatian khusus harus diberikan ke daerah pedesaan, di mana kesenjangan dalam layanan dukungan keluarga tetap lebih lebar daripada di pusat kota.

Saran selanjutnya menggunakan teknologi dan inovasi dapat memainkan peran penting dalam mendukung keluarga. Pemerintah dapat memanfaatkan platform digital untuk menyediakan sumber daya bagi orang tua baru, menawarkan perangkat pendidikan, dan menciptakan sistem dukungan keluarga yang memudahkan untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga. Inovasi dalam alat kerja jarak jauh dan kolaborasi digital dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel yang mendorong pembentukan keluarga.

Terakhir, pemerintah Jepang harus memastikan bahwa daerah pedesaan menerima perhatian yang memadai dalam hal layanan dukungan keluarga. Sementara daerah perkotaan telah mengalami peningkatan dalam penitipan anak dan layanan keluarga lainnya, daerah pedesaan terus menghadapi kesenjangan yang signifikan. Dengan mengarahkan lebih banyak sumber daya ke daerah-daerah ini, khususnya di bidang-bidang seperti penitipan anak

dan perawatan lansia, Jepang dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi keluarga, terlepas dari lokasi mereka.

Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, diharapkan Jepang tidak hanya dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan keluarga tetapi juga mengatasi masalah ekonomi dan budaya yang lebih luas yang berkontribusi pada tren bebas anak. Pada akhirnya, reformasi ini dapat membalikkan tren penurunan populasi dan memastikan masa depan demografi yang berkelanjutan dan seimbang bagi negara Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, T. (2019). *Declining Fertility in a Rapidly Aging Japan*.
- Author, T., & Hwang, G.-J. (2012). Explaining Welfare State Adaptation in East Asia: The Cases of Japan, Korea and Taiwan. In *Asian Journal of Social Science* (Vol. 40, Issue 2).
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *THEMATIC ANALYSIS*.
- Central Intelligence Agency. (2024). *CIA: Total Fertility Rate Comparison*. Central Intelligence Agency.
- Chanlett-Avery, E., & Nelson, R. M. (2014). "Womenomics" in Japan: In Brief *Specialist in Asian Affairs*. www.crs.gov/R43668
- Chapple Julian. (2004). The Dilemma Posed by Japan's Population Decline. *Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies*.
- Children in Japan and the National Government's Child-Related Measures. (2024). *White Paper on Children's Policy 2024*.
- Creswell, W. John. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design*.
- Fernando, T. (2024). *Socio-Economic and Demographic Challenges of Japan's Aging Population and Government Strategies for Support*. <https://www.researchgate.net/publication/386824046>
- Feronica, M., Amtai, B., Ahmad, A., Hilarius, M., Muhammad, W., Rahmat, R., Polikarpus, R., Triono, L., Mosshananza, H., Henri, I., Sunariyanto, K., Rijal, S., Anggelina, D., & Seran, N. (2023). *KEBIJAKAN PUBLIK: TEORI, FORMULASI DAN APLIKASI*. www.globaleksekitifteknologi.co.id
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*.
- Friedland, R. (2012). The Institutional logics Perspective: A new approach to culture, Structure, and Process. *Management, 15*(5), 583. <https://doi.org/10.3917/mana.155.0583>
- Galvan L. Jose, G. C. M. (2024). *Writing Literature Reviews* (8th ed.).
- Gelb, J. (2003). *Gender Policies in Japan and the United States*.
- Gender Equality Bureau Cabinet Office. (2024). *Current Status and Challenges of Gender Equality in Japan* Gender Equality Bureau, Cabinet Office Government of Japan.

- Glenda S. Roberts. (1997). *Pinning Hopes on Angels: Governmental Responses to Japan's Low Birth Rate*.
- Herman, S. (2022). *ELIAS-Policy-Brief-Kishida-New-Capitalism*.
- Howlett Michael, & Ramesh M. (2003). *Studying Public Policy Policy Cycles and Policy Subsystems (M. Ramesh, Michael Howlett) (Z-Library)*.
- International Monetary Fund. Asia and Pacific Dept. (2020). *IS AUTOMATION THE ANSWER TO JAPAN'S DEMOGRAPHIC CHALLENGES?*
- Jelita Magdalena Manalu. (2024). *PENGARUH_PAHAM_CHILDFREE_DAN_GERAKAN_FEM*.
- Kanno, T. (2016). *Act on the Welfare of Workers Who Take Care of Children or Other Family Members Including Child Care and Family Care Leave*.
- Katagiri, Y., Jwa, S. C., Kuwahara, A., Iwasa, T., Ono, M., Kato, K., Kishi, H., Kuwabara, Y., Taniguchi, F., Harada, M., Iwase, A., & Sugino, N. (2024). Assisted reproductive technology in Japan: A summary report for 2022 by the Ethics Committee of the Japan Society of Obstetrics and Gynecology. *Reproductive Medicine and Biology*, 23(1). <https://doi.org/10.1002/rmb2.12620>
- Kii, M., Chou, C.-C., Kono, T., & Otazawa, T. (2025). City size distribution and utility of living: Exploring intercity migration in Japanese urban systems. *Economic Analysis and Policy*, 85, 1238–1257. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.01.021>
- Kubo, T. (2019). *International Perspectives in Geography AJG Library II Divided Tokyo Disparities in Living Conditions in the City Center and the Shrinking Suburbs*. <http://www.springer.com/series/10223>
- Lee, G. H. Y., & Lee, S. P. (2014). Childcare availability, fertility and female labor force participation in Japan. *Journal of the Japanese and International Economies*, 32, 71–85. <https://doi.org/10.1016/j.jjie.2014.01.002>
- Malhotra, S. (2015). *Popular Culture, Media, and Globalization Reimagining a Nation: Neoliberalism and Media's Impact on Youth's Imaginaries in India*.
- Mark Craig. (2016). *The Abe Restoration*.
- Ministry Of Health, L. and W. (1995). *Annual Reports on Health and Welfare 1998-1999 Social Security and National Life*.
- Ministry of Health, L. and W. of J. (2025). *Japan Population*.
- Muhammadiyah Malang, U., & Ageng Prakoso, H. (2022). Fathering Japan : Strategi Jepang Dalam Mencapai Kesetaraan Gender Sebagai Respon Terhadap Kritik PBB Fathering Japan: Japan's Strategy for Achieving Gender

- Equality in Response to UN Criticism. *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)*, 5(1), 11–22.
- National Institute of Population and Social Security Research. (2017). *Population Projections for Japan*.
- Neal, Z. P., & Neal, J. W. (2024). Sample, time, and wording effects on estimating the prevalence of childfree adults: Insights from Japan. *PLoS ONE*, 19(4 April). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0302184>
- Nemoto, K. (2008). Postponed marriage: Exploring women's views of matrimony and work in Japan. *Gender and Society*, 22(2), 219–237. <https://doi.org/10.1177/0891243208315868>
- Ogawa, N. (2003). JAPAN'S CHANGING FERTILITY MECHANISMS AND ITS POLICY RESPONSES. In *Journal of Population Research* (Vol. 20, Issue 1). <http://about.jstor.org/terms>
- Oishi, N. (2021). Skilled or unskilled?: The reconfiguration of migration policies in Japan. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47(10), 2252–2269. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1731984>
- Okamoto, A. (2021). Immigration policy and demographic dynamics: Welfare analysis of an aging Japan. *Journal of the Japanese and International Economies*, 62. <https://doi.org/10.1016/j.jjie.2021.101168>
- Population Projections for Japan*. (2017). <http://www.ipss.go.jp/index-e.asp>
- Qingyi Huang. (2025, April 9). *East Asia's 'Childless Future': Can Japan's Policies Turn the Tide?* Synergy Journal Print Publication.
- Raymo, J. M., Uchikoshi, F., & Yoda, S. (2020). Marriage intentions, desires, and pathways to later and less marriage in Japan. *Demographic Research*, 41, 67–98. <https://doi.org/10.4054/DEMRES.2021.44.3>
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiayati, S. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Sandrina Natasya, R. (2025). *PERBANDINGAN FENOMENA CHILDFREE DI NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG : TINJAUAN LITERATUR*.
- Schoppa, L. J. (2020). The policy response to declining fertility rates in Japan: Relying on logic and hope over evidence. *Social Science Japan Journal*, 23(1), 3–21. <https://doi.org/10.1093/ssjj/jyz046>
- Seeleib-Kaiser, M., & Toivonen, T. (2011). Between reforms and birth rates: Germany, Japan, and family policy discourse. *Social Politics*, 18(3), 331–360. <https://doi.org/10.1093/sp/jxr016>
- Solis, M., & Urata, S. (2018). Abenomics and Japan's Trade Policy in a New Era. In *Asian Economic Policy Review* (Vol. 13, Issue 1, pp. 106–123). Blackwell Publishing. <https://doi.org/10.1111/aepr.12205>

- Song, J. (2015). Economic Empowerment of Women as the Third Arrow of Abenomics*. In *Source: Journal of International and Area Studies* (Vol. 22, Issue 1).
- Suwitri, S. (2010). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*.
- Suzuki, N. (2016). *History and Forthcoming Challenges of Family Care Leave Related Systems in Japan*.
- Suzuki, T. (2006). *Fertility Decline and Policy Development in Japan*.
- Takahashi, S., & Nakazawa, E. (2023). Is Japan Pronatalism Justified? Fear of Hinoeuma Women and Sex Selection. *Sexes*, 4(1), 94–101. <https://doi.org/10.3390/sexes4010009>
- Takao, Y. (2024a). Archives of Clinical Pediatrics Commentary Policy-oriented Understanding of Low Births: Why Cash Support Isn't Enough to Fix Japan's Low Birth Rate. In *Arch Clin Pediatr* (Vol. 1, Issue 1).
- Takao, Y. (2024b). Understanding fertility policy through a process-oriented approach: the case of Japan's decline in births. *Journal of Population Research*, 41(2). <https://doi.org/10.1007/s12546-024-09333-2>
- Takuya Nishimura. (2023, June 19). *Kishida's Population Strategy*. Asia Policy Point.
- Usami, M. (2024). Materiality of evidence-based policy making for child and adolescent psychiatry in Japan. *GHM Open*. <https://doi.org/10.35772/ghmo.2023.01016>
- Wang, Y. (2023). Understanding the phenomenon of childlessness in Japan: Causes and potential solutions. *SHS Web of Conferences*, 180, 01006. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202318001006>
- Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F. (2014). An Analysis of Challenges Faced by Japan's Economy and Abenomics. *Japanese Political Economy*, 40(3–4), 37–62. <https://doi.org/10.1080/2329194X.2014.998591>